

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Geliat gelombang demokrasi yang terjadi di Indonesia masih menarik untuk diteliti, banyak penelitian-penelitian terdahulu yang sudah menjelaskan bagaimana demokrasi di Indonesia dalam berbagai kasus¹, serta menjelaskan apa itu demokrasi dan pemahaman demokrasi yang diberikan secara substansional yakni pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam lingkup lebih terfokus.² Dalam konsepnya, demokrasi diperlihatkan dalam bentuk sebuah sistem negara yang ideal yang mampu membantu negara tersebut untuk lebih maju³,

¹ Salah satu penelitian yang menarik bagi peneliti adalah penelitian yang diambil dari jurnal ilmu pemerintahan yang menjelaskan bagaimana perkembangan demokrasi, partai politik dan kepala daerah yang ditulis oleh Affan Sulaiman. Dalam jurnalnya peneliti bercerita bahwa demokrasi memiliki substansi yakni pemilihan umum yang akhirnya melahirkan partai politik dan dalam pemilihan umum salah satu bagian dari pemilu itu adalah pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Rujuk Affan Sulaiman, demokrasi, partai politik, dan pemilihan kepala daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015. Vol. 1(1), hal 17-23 (ISSN 2442-5958)

² Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-ide tentang demokratisasi berkaitan dengan strategi untuk mencapai demokrasi. Proses pendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitutionalisasi ketidakpastian, menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Pemahaman demokrasi yang paling substansial adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung-jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyat karena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung. Rujuk affan sulaiman, demokrasi, partai politik, dan pemilihan kepala daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015. Vol. 1(1), hal 15-23 (ISSN 2442-5958)

³ Negara yang ideal adalah negara demokrasi, sebab dengan demokrasi kebebasan berpendapat dijamin dan hubungan antara penguasa dengan rakyat dilakukan secara proporsional. Negara demokrasi inilah yang disebut sebagai negara yang meniscayakan kondisi moderat atau pertengahan bagi pola relasi antara penguasa dengan rakyat. Rujuk M. Agus Muwahidin, Urgensi

begitu juga dalam pemilihan kepala daerah, demokrasi menjadi sesuatu yang substansi ketika kepala daerah dipilih secara demokratis. Ciri yang paling mendasar dari negara yang menggunakan sistem demokrasi adalah dengan adanya keberadaan pemilihan umum, walaupun sebenarnya pemilihan umum bukanlah satu-satunya aspek dari demokrasi, tetapi pemilihan umum menjadi komponen yang sangat penting untuk merubah mekanisme perubahan politik dan elit secara tertib dan periodik.

Namun, realita yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan teori yang diterapkan, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran demokrasi dalam pemilihan kepala daerah⁴ dan juga hal baru yang menjadikan pemilihan kepala daerah semakin berwarna, seperti adanya broker-broker politik dalam Pilkada⁵. Secara definisi broker dalam pengertian bahasa menurut (KBBI) kamus besar bahasa

Demokrasi Dalam Upaya Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur, *Jurnal UIN SU*, 2013. Vol. 3 (2) . hal 400-434

⁴ Berdasarkan laporan Bawaslu yang dikutip oleh ICW (dalam Perludem, 2016: 87-88), sepanjang pemilu 2014 terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 1.238. Dugaan Pelanggaran terdiri dari 1.136 dugaan pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran administrasi tersebut kemudian diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Sisanya, 81 dugaan pelanggaran pidana dan 21 dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran terbanyak menyangkut pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), politik uang dan kampanye hitam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Rujuk, Ratna Solihah dkk, Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 2014. Vol.1(1), hal 3-15

⁵ Tim sukses dibentuk dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah secara langsung (Pemilukada) memperoleh kemenangan. Tim adalah sebuah proses pertarungan karena sebagai instrumen penting dalam kemenangan pemilukada, termasuk pemilukada Brebes Tahun 2012. Di sisi lain, pembentukan tim sukses merupakan juga sebuah tuntutan dari regulasi KPU yang memberikan persyaratan bahwa setiap pasangan calon harus menyerahkan tim kampanye dalam rangka mengkomunikasikan antara kepentingan-kepentingan tahapan yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan pasangan calon secara langsung, karena tidak mungkin setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU akan dihadiri oleh pasangan calon yang bersangkutan, dan karena itu tim sukses pasangan calon yang menjadi wakil pada setiap momentum atau kegiatan yang diselenggarakan KPU, sehingga peran sebuah tim sukses menjadi penting di dalam kontestasi Pilkada. Rujuk, Surahmadi, Strategi Pemenangan Politik Pasangan Idza-Narjo Dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2017. *e-jurnal Undip Politik*, 2016 vol 7(2), hal : 91-109

Indonesia adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli (saham dsb); “cengkau; makelar; pialang”.⁶ Selain dari bahasa, beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa broker diartikan sebagai penghubung.⁷

Dalam ranah Ilmu Ekonomi kata-kata broker bukanlah lagi hal yang asing untuk didengar⁸, tidak hanya di dalam ranah ekonomi saja, broker juga menjadi bahasan yang sangat menarik bagi Ilmuan Politik, broker dalam dunia politik sering dikaitkan dengan pola klientalisme atau pola-pola patronase yang berbicara bagaimana pola hubungan antara *patron* dan *klien*, broker terletak diantara hubungan *patron* dan *klien* tersebut karena broker diartikan sebagai penghubung atau orang ketiga antara *patrone* dan *klien*⁹. Dari beberapa ulasan di atas peneliti mulai dapat mendefenisikan broker tersebut sebagai pihak ketiga penghubung antara pihak pertama dengan pihak kedua, yang mana artinya broker sangat

⁶ Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://artikbbi.com/broker/> Di Kutip Pada Tanggal 5 September 2018, Pikul 12:28 Wib.

⁷ Broker seperti yang diungkapkan oleh Desi Ratnasari dalam skripsinya Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sutan Riska - Amrizal Pada Pemilu Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015, mengatakan bahwa broker menghubungkan kandidat yang berada pada puncak piramida dengan para pemilih pada level terbawah (Desi 2017). Broker dijelaskan sebagai penghubung antara seorang kandidat yang berada di puncak piramida dengan para pemilihnya yang berada di level terbawah, berarti broker juga diumpakan sebagai sebuah jembatan penghubung yang akan menghubungkan antara kandidat dengan masyarakat dan broker tersebutlah yang akan menjadi pihak ketiganya. Rujuk, Desi Ratnasari, Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sutan Riska - Amrizal Pada Pemilu Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015, *Skripsi, Ilmu Politik, fisis unand*, (2017). Hal : 122

⁸ Ketika berbicara persoalan broker itu dari sisi ekonomi maka bisa di artikan sebagai orang yang menghubungi atau penghubung antara satu pedagang dengan pedagang lainnya dalam proses jual beli atau bisa di bilang dengan makelar, pialang atau toke dalam bahasa tradisionalnya.

⁹ Sl. Harjonto. Pemilu Politik Patronase Dan Ideologi Parpol. , 2012, *Jurnal Akp*, Vol 1 (2), Hal. 94-102

berperan penting diantara kedua pihak tersebut serta memiliki *resource* untuk dijadikan daya jual mereka sebagai broker.¹⁰

Broker politik merupakan sebuah konsep yang tidak jauh berbeda patronase politik, politik uang ataupun klientalisme, maka peneliti akan menjabarkan sedikit definisi dari ketiga konsep tersebut agar dapat dengan jelas perbedaan konsep tersebut dengan broker politik. Klientalisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen iterasi, *status inequality* dan resiprokal. Kemudian, klientalisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Maka dapat dipastikan bahwa klientalisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientalisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya.¹¹

Sedangkan politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual -

¹⁰ *Loc, Cit.* KBBI 2018

¹¹ Rekha Adji Pratama. Patronase dan klientalisme pada Pilkada serentak kota kediri tahun 2017. *Jurnal wacana politik.*-ISSN 2502-9185. Volume 2. No. 1. Maret 2017. Hal. 33-45

beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹²

Politik uang juga dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum .

Politik Uang juga tidak luput dengan pola patronase dimana Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung).¹³

Dalam sejarahnya, broker dan politik sudah mulai dikenal di kalangan dunia ketika pemilihan kepala daerah secara langsung mulai diadakan, berdasarkan Jurnal *Kellogg Intitute, Working Paper 140*, yang di tulis oleh Ronald

¹² Iqbal Syafrudin,dkk. Money politic dalam praktik demokrasi indonesia. Jurnal *Nasional Hukum Universitas Negri Semarang*. ISSN 2614-3569. Vol. 4. No. 2. Tahun 2018. Hal. 228-237

¹³ Rekha Adji Pratama. Ptaronase dan klientalisme pada Pilkada serentak kota kediri tahun 2017. Jurnal *wacana politik*.-ISSN 2502-9185. Volume 2. No. 1. Maret 2017. Hal. 33-45

P. Arcer dengan judul *The Transition From Tradisional To Broker Clientalism In Colombia: Political Stability And Social Unrest*. Broker di gambarkan sebagai awal dari transisi tradisional menuju perilaku broker yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan dan menghidupi kehidupan mereka¹⁴. Arcer berasumsi, para broker dan klientalisme yang terjadi di Colombia adalah orang-orang yang berasal dari kaum pedesaan yang masih berperilaku tradisional, di mana mereka bertindak menjadi broker agar mendapat keuntungan secara materi dari jasa yang mereka berikan kepada pengguna (calon). Dari studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Arcer melihat bagaimana broker di lihat sebagai sesuatu konsep yang baru muncul kepermukaan dan menjadi sebuah gagasan baru dalam pola pemilihan umum, dan dalam gagasannya Arcer mengedepankan bagaimana broker berasal dari transisi masyarakat tradisional yang membutuhkan uang dari para calon dan menjadi broker bagi mereka.

Di Indonesia sendiri broker mulai masuk dalam ranah politik saat awal pemilihan umum mulai di terapkan di Indonesia. Sesuai yang dikatakan oleh Edward Aspinall dalam Jurnal *Critical Asian Studies* dengan judul *When Brokers Betray: Clientelism, Social Network, And Electoral Politics In Indonesia*, bahwa sejarahnya broker mulai masuk dalam ranah politik di Indonesia serta mulai berkembang ketika era reformasi berkejolak, dengan berkejolaknya reformasi nilai-nilai demokrasi kembali dihidupkan sehingga pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah mulai dilakukan secara langsung atau dipilih langsung oleh

¹⁴ Ronald P Arcer, 1990, *The Transition From Tradisional To Broker Clientalism In Colombia: Political Stability And Social Unrest*. *Jurnal Kellogg Institute, Working Paper 140*. Vol 1, No 1, Hal. 5-42

rakyat.¹⁵ Menariknya studi yang dilakukan oleh Aspinall adalah meneliti bagaimana broker mulai berkembang di Indonesia, selain itu Aspinall juga menjelaskan bagaimana broker bermain dan bisa berkhianat kapan saja.¹⁶

Selain itu penelitian yang berbicara mengenai broker antara lain seperti, (1) Ronald P Arcer¹⁷(1990) yang berbicara mengenai bagaimanan broker bekembang pada awal tahun 1990an, (2) Abdul Hamid¹⁸(2010), melihatkan posisi broker yang diisi oleh aktor lokal yakni Kiyai dan para jawara di Banten pada era pasca orde baru, (3) Moh Ilham,dkk¹⁹(2014), berbicara bagaimana broker politik menjadi mafia anggaran. Dan (4) Edward Aspinall²⁰(2014), mengulas tentang perkembangan awal broker politik di Indonesia dan pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan broker.

Selain menjelaskan perkembangan broker serta pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan broker, Aspinall dengan jurnalnya yang sama juga merincikan broker kedalam tiga bagian²¹, di mana pada setiap bagian tersebut

¹⁵ Edward Aspinall, 2014, When Brokers Betray: Clientelism, Social Network, And Electoral Politics In Indonesia. *Jurnal Critical Asian Studis*, Vol 46 (4). Hal. 548-568

¹⁶ Aspinall menggambarkan bagaimana broker dapat berkembang di era pertama kali pemilihan umum dilakukan di Indonesia, serta aspinall juga menjelaskan bahwa ternyata broker-broker politik dapat berkhianat kapan saja ketika ada calon yang dapat memberikan keuntungan yang lebih kepada dia. Dalam artian broker akan melihat dari segi materi calon tersebut apakah calon tersebut memiliki amunisi materi yang cukup dan dapat menguntungkan mereka, kalau tidak maka para broker bisa saja akan berkhianat kepada calon lain yang lebih menguntungkan. Rujuk Aspinall When Brokers Betray: Clientelism, Social Network, And Electoral Politics In Indonesia untuk penjelasa lebih lanjut.

¹⁷ P. Arcer Loc, Cit.

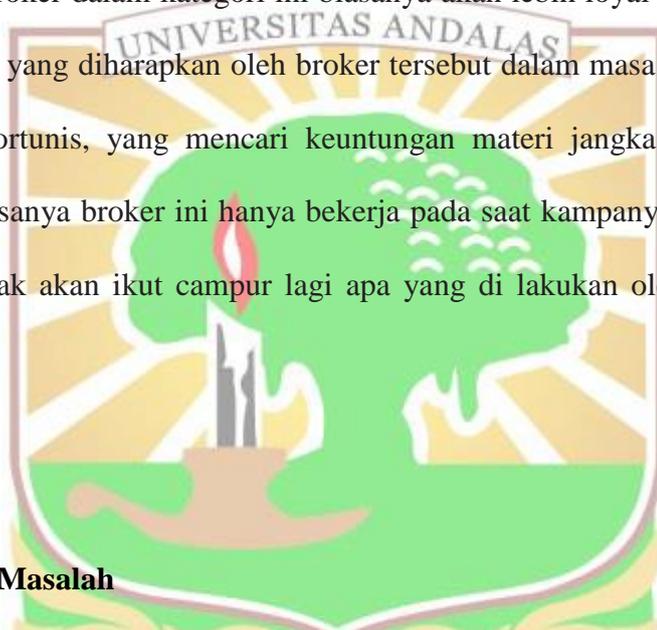
¹⁸ Abdu Hamid, (2010), Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Abru: Studi Kasus Kiyai Dan Jawara Di Banten. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 (2). Hal : 32-45

¹⁹ Moh Ilham A Hamudy Dan Ahmad Imama M. Rais, 2014, Broker Politik Dan Mafia Anggaran Dalam Parlemen Di Indonesia, *Jurnal Junior Researcher At Research And Development Agency Ministry Of Home Affairs, Republic Of Indonesia*

²⁰ Edward Aspinall . *Loc, cit.* (2014), yang akan peneliti jelaskan lebih rinci pada bab 2.

²¹ Edward Aspihall . *Loc, cit* (2014) Hal : 545-570

melihatkan tujuan, dan fungsi dari masing-masing pembagian tersebut; (a) broker aktivis, yang mendukung kandidat berdasarkan politik, etnis, agama, atau komitmen lainnya, broker dalam kategori ini menjelaskan bahwa mereka sebagai broker menggunakan apa yang mereka miliki dan dapat mempengaruhi orang lain; (b) broker klientelis, yang menginginkan hubungan jangka panjang dengan kandidat atau dengan broker yang lebih senior, dengan tujuan menerima hadiah di masa depan, broker dalam kategori ini biasanya akan lebih loyal kepada atasannya karena ada hal yang diharapkan oleh broker tersebut dalam masa jangka panjang; (c) broker oportunistis, yang mencari keuntungan materi jangka pendek selama kampanye, biasanya broker ini hanya bekerja pada saat kampanye dan pasca dari itu mereka tidak akan ikut campur lagi apa yang di lakukan oleh pengguna jasa mereka.



1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan umum kepala daerah di Kota Padang Panjang telah dilakukan sejak Tahun 2003 yang mana pada saat itu dimenangkan oleh Suir Syam, dan kembali dilakukan pada Tahun 2008 dan masih dimenangi oleh *incumbent* Suir Syam sampai masa jabatan Tahun 2013. Pada Tahun 2013 kedudukan Walikota Padang Panjang baru-lah digantikan oleh Hendri Arnis dengan perolehan suara yang diterima olehnya 43,82 %²².

²²Dikutp dari data KPU, pada Tanggal 8 januari 2019, jam 16:00 WIB. <https://Kota-padangpanjang.kpu.go.id/>

Pada Tahun 2018 Kota Padang Panjang kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah pada Tanggal 27 Juni 2018, di mana ada 4 pasangan calon yang bersaing untuk memperebutkan kursi Walikota dan wakil Walikota. 4 pasangan calon tersebut diusung oleh partainya masing-masing, berikut data pasangan calon beserta partainya:

Tabel 1.1
Daftar Pasanan Calon Pada Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon		Partai Pengusung
	Walikota	Wakil Walikta	
1	Mawardi	Taufiq Idris	1. Partai Demokrat 2. PPP
2	Hendri Arnis	H. Eko Furqani	1. Pan 2. Partai Nasdem
3	Rafdi M.Syarif	Ahmad Fadly	1. Partai Gerindra 2. PKS 3. PBB
4	Fadly Amran	Asrul	1. Partai GOLKAR 2. Pdi-Perjuangan

(Data KPU Kota Padang Panjang Tahun 2018)²³

Dari 4 pasangan calon tersebut pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 4 yaitu Fadly Amran dan Asrul, kemenangan tipis dari Pasangan Calon Nomor 2 Hendri Arnis dan Eko Furqani yang merupakan pasangan petahana²⁴ dalam Pilkada Tahun 2018 di Kota Padang Panjang. Berikut perolehan suara masing-masing paslon :

²³ Data KPU Kota Padang Panjang, Nomor Urut Pasangan Calon Dan Partai Pengusung Dalam Pilkada Tahun 2018

²⁴Berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya

Tabel 1.2
Hasil Peroleha Suara Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018

No Urut	Nama Paslon		Perolehan Suara	Persentase
	Walikota	Wakil Walikota		
1	Mawardi	Taufiq Idris	4.256	16,5 %
2	Hendri Arnis	H. Eko Furqani	9.338	36,3 %
3	Rafdi M.Syarif	Ahmad Fadly	1.940	7,5 %
4	Fadly Amran	Drs. Asrul	10.191	39,6 %

(Data KPU Kota Padang Panjang Tahun 2018)

Kemenangan Fadly Amran dan Asrul menjadi sebuah pembahasan yang begitu menarik, kemenangan Fadly Amran-Asrul bukanlah kemenangan yang dengan mudah diraih pada saat Pilkada Padang Panjang tersebut, mereka harus mengalahkan 3 calon lain yang memiliki basis massanya masing-masing.²⁵ Dengan basis massa yang dimiliki oleh ketiga calon tersebut maka akan sangat sulit untuk Fadly Amran dan Asrul dapat memenangkan Pilkada Kota Padang

digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat petahana dan non petahana. Sebagai contoh, pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 yang akan datang, Jokowi adalah petahana, karena ialah presiden yang sedang menjabat pada saat pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan presiden berikutnya. Dalam persaingan kursi-terbuka (di mana sang petahana tidak mencalonkan diri), istilah "petahana" terkadang digunakan untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang masih memegang jabatan kekuasaan. Rujuk kamus besar bahasa Indonesia untuk pemahaman lebih lanjut.

²⁵ Pasangan calon nomor urut 1 adalah Mawardi yang merupakan mantan wakil Walikota terpilih Padang Panjang sebelumnya, Mawardi memiliki basis massa yang diperkirakan sangat royal dengan beliau karena beliau adalah seorang dokter yang kerap mengobati masyarakat dengan tarif murah sehingga beberapa masyarakat sangat senang dengan Mawardi dan menjadi massa dengan ikatan emosional dengan Mawardi. Pasangan nomor urut 2 yang merupakan pasangan petahana yang tentunya sudah pasti memiliki basis massa yang cukup besar, Hendriarnis tentu memiliki massa tetap yang sudah terjalin pada saat Pilkada sebelumnya yang membantu beliau dapat menduduki kursi Walikota periode 2014-2018 dan akan menjadi pendukungnya lagi dalam Pilkada 2018. Dan sedangkan nomor urut 3 adalah pasangan calon yang di isi oleh anak dari Suir Syam mantan Walikota Padang Panjang dua periode sebelumnya, tentunya basis massa dari orang tuanyalah yang diharapkan menjadi massa oleh pasangan nomor urut 3 ini.

Panjang Tahun 2018. Namun, ternyata pasangan Fadly Amran dan Asrul dapat memenangkan Pilkada dengan persentasi suara yang cukup tipis dengan nomor urut 2.

Kemenangan Fadly Amran dan Asrul adalah sebuah fenomena cukup menarik, melihat dari latar belakang Fadly Amran yang merupakan seorang pengusaha dan Fadly juga adalah orang yang aktif dalam berorganisasi yang mana jabatan hingga sekarang adalah ketua KNPI Sumatra Barat, selain itu Fadly juga adalah orang yang aktif berbisnis di Kota Padang, bukan di Kota Padang Panjang walaupun kolega-kolega pembisnisnya mungkin saja ada dari Kota Padang Panjang.²⁶ Maka dari itu, secara popularitas Fadly Amran dimata kalangan masyarakat Padang Panjang sangat tidak meyakinkan untuk dapat menduduki jabatan Walikota, dikarenakan sosok Fadly yang bukan merupakan kelahiran dari kota Padang Panjang serta keseharian beliau yang sangat jarang berada di Kota Padang Panjang sehingga menjadikan dirinya tidak dikenal begitu luas oleh masyarakat asli Kota Padang Panjang.

Menariknya penelitian ini adalah, berangkat dari asal usul dan lamanya berkegiatan Fadly Amran yang di habiskan di Kota Padang, bukan di Kota Padang Panjang. Kenapa bisa seorang sosok Fadly Amran yang bukan kelahiran Padang

²⁶ Fadly Amran adalah orang yang aktif berbisnis di Kota Padang, kesehariannya kebanyakan di habiskan di Kota Padang, selain itu Fadly juga putra kelahiran Padang, 9 Februari 1988 tinggal di Kampung Jao, Padang Barat. Dari biodata Fadly terlihat bahwa secara popularitas beliau di awal dengan kalangan masyarakat Padang Panjang sangatlah tipis, dikarenakan sosok beliau yang bukan putra daerah Kota Padang Panjang dan kesehariannya yang terbilang sangat sedikit di Kota dingin ini. Namun hal itu tidak menjadi penghambat untuk Fadly Amran dapat memenangkan kontestasi Pilkada Padang Panjang tahun 2018. Sumber : [Http://Kota-Padangpanjang.Kpu.Go.Id/2018/01/12/3-Fadly-Amran-Dan-Drs-Asrul/](http://Kota-Padangpanjang.Kpu.Go.Id/2018/01/12/3-Fadly-Amran-Dan-Drs-Asrul/), diakses Tanggal 6 September 2018, Jam 22:21.

Panjang, serta jarang berkegiatan di Kota Padang Panjang dan juga termasuk kandidat yang sangat baru di duni politik praktis dan akhirnya mampu mengalahkan 3 calon lain yang cukup kuat, bahkan dua dari tiga calon lawannya adalah pasangan petahana yang sebenarnya memiliki peluang lebih besar untuk dapat memenangkan kontestasi Pilkada Padang Panjang tahun 2018. Namun, hal itu dapat ditepis oleh seorang Fadly Amran yang bukan kelahiran asli Padang Panjang, sehingga peneliti melihat hal ini sebagai fenomena yang menarik untuk diteliti. Walaupun tak terlepas dari Fadly adalah seorang pengusaha yang tentu dia memiliki jaringan yang luas serta lamanya dalam berorganisasi yang membuat beliau tidak akan canggung dengan dunia politik, namun peneliti melihat Fadly akan butuh usaha yang lebih keras untuk mampu menang dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018

Kalau kita melihat dari rekam jejak seorang Fadly Amran di Kota Padang Panjang tidak bisa menjamin kemenangannya dengan mudah, peneliti melihat ada faktor kunci yang menjadi faktor kemenangan Fadly Amran tersebut. Faktor tersebut yang peneliti lihat adalah dengan adanya broker-broker politik yang membantu Fadly Amran dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018. Di mana broker ini sangat berperan sentral dalam mengkampanyekan sosok Fadly Amran dan Asrul dan menepis isu-isu yang akan mengancam popularitas pasangan Fadly Amran-Asrul. Broker politik diartikan sebagai seseorang yang bekerja sebagai penghubung antara kandidat dengan masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum, hal ini dapat dicontohkan seperti tim sukses, relawan, dan

simpatisan yang bersedia menjadi penghubung antara kandidat dengan masyarakat.²⁷

Broker yang terlibat di dalam khusus ini adalah orang-orang yang benar-benar menjadi penghubung antara masyarakat dengan Fadly Amran-Asrul, dimana peneliti sendiri melihat ada beberapa broker yang terlibat diantaranya adalah pertama tim sukses, tim sukses dapat dikatakan sebagai tim pemenangan atau tim kampanye. Adapun yang dimaksud dengan Tim Sukses adalah organisasi yang dibentuk dengan prinsip efektifitas dan sesuai dengan kebutuhan hasilnya dapat terukur. Dimana yang dimaksud dengan Tim Sukses adalah suatu tim yang dibentuk oleh partai politik dan koalisinya untuk manajemen, merumuskan, dan merancang strategi pemenangan dalam pemilihan umum. Tim Sukses dibentuk untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, termasuk suara pemilih dari partai dan pendukung calon Bupati atau Walikota.²⁸ Peneliti menyadari bahwa tidak semua tim sukses terlibat jadi seorang broker politik namun ada beberapa yang tentu berperan menjadi broker politik dalam tim Fadly dan Asrul.

Kedua adalah tokoh masyarakat, peneliti melihat bahwa adanya keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan dilingkungannya serta memiliki jumlah massa yang cukup banyak tentu mereka bisa dikategorikan menjadi broker, ada sebuah *resource* yang para tokoh tersebut miliki sehingga mampu dijadikan tolak ukur suara bagi Fadly dan Asrul. Selain itu juga ada relawan dan simpatisan merupakan bagian dari *resource* dari broker yang bekerja untuk membantu Fadly Amran-Asrul. Relawan atau simpatisan dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang

²⁷ Edward Aspinall, Loc cit. Hal: 552

²⁸ Abdul Rahman, 2017, Kontribusi Tim Sukses Suparman Sukiman (Susuki) Dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, Jurnal *Jom Fisip* Vol. 4(2). Hal : 1-13.

bekerja dan memiliki tujuan yang sama dengan tim sukses namun tidak terdaftar secara resmi di KPU atau Bawaslu. Tim sukses, tokoh masyarakat, adalah bentuk dari broker politik yang menjadi asumsi dari keterlibatan broker dalam Pilkada Kota Padang Panjang tahun 2018, yang mana sesuai dikatakan Aspinall bahwa broker itu dibagi kedalam tiga bagian sehingga peneliti melihat bahwa tim sukses, relawan dan simpatisan tersebut lebih cenderung kepada broker Opportunistic, namun tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga dikategorikan kedalam broker klientalis atau aktivis yang nantinya akan menjadi hasil dari penelitian ini.

Dari asumsi dan indikasi tersebut, peneliti mencari bukti dan data penunjang bahwa sebenarnya apakah indikasi dari keterlibatan broker dalam memenangkan paslon Fadly Asrul pada Pilkada Padang Panjang tersebut benar adanya dan dapat dibuktikan sebagai landasan bagi peneliti untuk mengkaji kasus ini.²⁹

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga, ternyata ada relawan yang datang ke rumah warga untuk melakukan sosialisasi calon Fadly Amran-Asrul dan memberikan pengaruh untuk memilih kandidat tersebut. Relawan yang

²⁹ Berikut beberapa bukti yang peneliti dapat dari hasil wawancara dan berita online. Berikut hasil kutipan wawancara yang peneliti tanyakan kepada warga: “peneliti : Ibuk eka patang milih Fadly Amran-Asrul waktu Pilkada? Buk eka: iyo nak Ibuk milih Fadly Amran-Asrul kapatang ko. Peneliti: dari ma Ibuk bisa kenal Pak Fadly sedangkan inyo indak urang asli Padang Panjang do. Buk eka: iyo Ibuk kenal Pak Fadly ko yo ado nan datang ka rumah Ibuk, tu urang tu sampain ka Ibuk baa Pak Fadly ko, tunyo kecekan baa visi misinyo kalau tapiliah, sampainyo ajak Ibuk untuak milih Pak Fadly pas pencoblosan.” buk Eka (35th) (*iya Ibuk memilih Fadly Amran, Ibuk kenal dengan Fadly karena ada yang datang kerumah Ibuk dan menjelaskan bagaimana Fadly dan memberitahu bagaimana visi dan misinya.*)

Hasil wawancara kedua hasilnya hampir sama dimana Pak Edi mengenal sosok Fadly Amran karena ada relawan yang medatangi rumahnya. Berikut kutipannya ; “Pak Edi (38th): Ambo mengenal Fadly Amran ko dek ado yang datang karumah ambo tu mangecekan baa elok inyo ado kayak relawan inyo masuk ka rumah tu mambagian bagian kayak karateh yang ado visi misi Fadly Amran Asrul tunyo agian sajadah.” (*Bapak mengenal Fadly Amran karena ada yang datang kerumah seperti relawan, dan memberikan brosur dan juga sajadah*)

berdatangan kerumah inilah yang peneliti pahami sebagai sebuah broker politik yang menjadi penghubung antara masyarakat dan calon yakni Fadly Amran-Asrul yang juga bisa disebut dengan broker akar rumput. Peran mereka sebagai broker adalah untuk mensosialisasikan sosok calon dan membuat masyarakat tahu, mengenal, yakin dan memilih calon yang menggunakan jasa relawan atau broker akar rumput ini.

Selain itu hasil kutipan dari berita Tribun Padang.Com, dalam berita online tersebut mengisyaratkan bahwa adanya keterlibatan tim sukses dalam kemenangan Fadly Amran, berikut isi beritanya;

“Kendati begitu, ia meminta seluruh tim sukses serta simpatisan Fadly Amran-Asrul untuk menunggu hasil pleno dari KPU Padang Panjang, yang disampaikan oleh Fadly Amran ketika hari H penghitungan suara.”³⁰.

Selain itu, ada juga dari berita *online* Pasbana.com, yang di dalam berita tersebut juga memberikan bukti bahwa Pasangan Fadly amran-Asrul memiliki tim kemenangan yang menjadi broker bagi Fadly Amran-Asrul, berikut isinya;

“Ketua Tim Pemenangan Fadly-Asrul, Marzuki Yunizar kepada wartawan di poskonya, Minggu (24/6) sore, mengatakan, rencana hari Senin (25/6) kita bersama tim kuasa hukum akan mendatangi panwaslu untuk menyampaikan laporan.”³¹

Dari bukti dan data yang peneliti temukan melalui wawancara serta kutipan beberapa berita tersebut menyatakan bahwa Fadly-Asrul memiliki tim sukses atau tim kemenangan yang artinya sejalan dengan yang dikatan oleh

³⁰ Dikutip Dari Tribun News.com. M.Iqbal, 2018, *Pilkada Padang Panjang, Tim Pemenangan Fadly Amran-Asrul Klaim Ungguli Perolehan Suara*, Di Akses Tanggal 18 September 2018, Jam 19:51. [Http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/06/27/Pilkada-Padang-Panjang-Tim-Pemenangan-Fadly-Amran-Asrul-Klaim-Ungguli-Perolehan-Suara](http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/06/27/Pilkada-Padang-Panjang-Tim-Pemenangan-Fadly-Amran-Asrul-Klaim-Ungguli-Perolehan-Suara)

³¹ Dikutip Dari Pasbana.com. Puput, 2018, *Tim Fadly Amran-Asrul Bikin Laporan Ke Panwaslu, Beberapa Nama Asn Akan Dilaporkan*, Di Akses Tanggal 9 Januari 2019, Jam 23.30 Wib. [Http://Www.Pasbana.Com/2018/06/Tim-Fadly-Asrul-Bikin-Laporan-Ke.Html](http://Www.Pasbana.Com/2018/06/Tim-Fadly-Asrul-Bikin-Laporan-Ke.Html)

Edward Aspinal dalam jurnalnya *When Brokers Betray: Clientelism, Social Network, And Electoral Politics In Indonesia* bahwa broker politik cenderung dibahasakan sebagai sebuah tim sukses atau tim pemenangan, yang mendukung dan membantu calon untuk memenangkan kontestasi Pilkada.

Dari indikasi dan bukti keterlibatan broker di atas maka peneliti ingin meninjau bagaimana konsep, peran, bentuk dan keterlibatan mengenai broker itu sendiri, dari beberapa literatur yang peneliti baca maka ada beberapa konsep dari broker itu sendiri. Menurut Susan C. Stokes Broker politik juga dapat berarti kekuatan lokal dan individu lokal yang berkuasa yang mungkin berusaha mendapatkan keuntungan dari pengaruh mereka atas orang-orang yang mereka bantu.³² Selain itu Broker juga dapat diartikan sebagai penghubung antara kandidat yang berada pada puncak piramida dengan para pemilih pada level terbawah³³. Selain apa itu broker peneliti juga akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan klientalisme, politik uang dan patronase, ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan memiliki perbedaan yang cukup tipis, sehingga peneliti sudah meuraikan sedikit ketiga konsep tersebut di latar belakang agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna broker tersebut.

Dari konsep beberapa konsep di atas serta peneliti juga sudah mendefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan broker politik, maka peneliti dapat melihat bahwa broker tersebut merupakan pihak ketiga penghubung

³² Loc. Cit. Susan C. Stokes. Hal : 98

³³ Desi Ratnasari, 2017, *Bentuk-Bentuk Patronase Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sutan Riska - Amrizal Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.

antara sang calon sebagai puncak piramida dengan masyarakat sebagai pemilih yang berada dibawah, selain itu broker sebagai orang yang memiliki kekuatan atau pengaruh besar di dalam tatanan masyarakat lokal yang dapat menggiring opini masyarakat kepada calon yang mereka bantu, dan sang broker akan meminta imbalan atas jasa yang mereka berikan tersebut. Broker juga diistilahkan sebagai tim sukses yang memiliki anggota seperti ketua atau pimpinan komunitas, adat, agama, pengusaha bahkan pemuda sekalipun yang siap membantu untuk kemenangan dari calonya, selain itu broker juga merupakan individu yang memiliki *resource* yang akan mereka jual kepada kandidat untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Bagi para broker momen Pilkada adalah momen yang sangat di tunggu dan sangat berharga bagi setiap broker, karena dari pengaruh dan kekuasaan lokal yang mereka miliki mereka dapat merauk pundi-pundi uang dari setiap calon yang akan membutuhkan jasanya.

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti uraikan dan jabarkan di atas maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan peneliti jawab dalam penelitian kali ini, diantaranya adalah :

1. Apa saja kategori broker yang memenangkan Fadly Amran-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018.
2. Bagaimana keterlibatan broker terhadap kemenangan Fadly Amran-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018.
3. Bagaimana kekuatan broker dalam memenangkan Fadly Amran-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti jabarkan sebelumnya maka ada beberapa hal yang akan menjadi tujuan penelitian yang akan peneliti capai dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Untuk mengidentifikasi kelompok broker dalam Memenangkan Fadly Amran-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018.
2. Untuk menganalisis keterlibatan broker terhadap kemenangan Fadly Amran-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018.
3. Untuk menganalisis pemetaan kekuatan broker dalam memenangkan Fadly Amran-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana keterlibatan Broker dalam Pilkada terhadap kemenangan Fadly Amran-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti broker politik.
2. Secara sosial, penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan baru yang berguna untuk melihat bagaimana keterlibatan broker dalam Pilkada, sehingganya masyarakat bisa mengetahui dan merasakan bagaimana broker dapat berperan di tengah-tengah masyarakat.